



Radar Bali

Dua Staf Pemkot Diperiksa

Bermobil Pemkot, Satu Berkelit Pegawai Polresta

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar terus didalami Kejati Bali. Kemarin (14/4) untuk kali kedua, Kadishub Kota Denpasar Gede Astika diperiksa kembali, bahkan ada dua juga staf lainnya diperiksa.

Yang menarik, sepertinya ada orang Pemkot Denpasar yang kemarin mengaku staf PNS atau pegawai negeri sipil di Polresta. Pemeriksaan dilakukan secara serempak oleh Tim yang menangani kasus dugaan mafia izin reklame di Pemkot Denpasar. Ketua Tim yang menangani kasus ini adalah Jaksa Made Subawa, anggota Dayu Sulasmi, Junaedi Tandi dan Mahanudin. Kadishub Astika diperiksa oleh Made Subawa, padahal Senin (13/4) Astika sudah diperiksa di Kejati Bali.

"Lagi Kadishub diperiksa, kayaknya ada yang kurang penjelasannya. Sehingga diminta



MIFTA HUDDIN/RADAR BALI

NGAKU DARI POLRESTA: Dewa Wisnawa (tengah) saat dicegat koran ini di Kejati Bali, kemarin.

penjelasan lagi Kadishub itu," ungkap sumber koran ini.

Selain itu ada juga dua orang lain diperiksa. Satu orang dipikarakan dari Perizinan Kota Denpasar dan satu lagi dari DTRP (Dinas Tata Ruang dan Perumahan). Usai pemeriksaan, buru-buru Kadishub Astika dan DTRP meninggalkan Kejati. Hanya satu orang yang mengenakan pakain endek warna cream yang bisa dicegat. Unikny pria ini

mengaku dari Polresta Kota Denpasar. "Saya dari Polresta, tapi di PNS-nya di sipil saya," kilahnya.

Dia mengatakan juga diperiksa terkait dengan perizinan reklame yang juga melibatkan kepolisian. "Says disuruh ke sini oleh atasan di Polresta, saya jelaskan saja," ungkap pria yang mengaku bernama Dewa Wisnawa. Benar dari Polresta? "Ya benar, saya dari Polresta," imbuhnya. Namun menariknya, dia malah

membawa mobil dinas sejenis Kijang Super dengan plat merah DK 1889 A. dan ketika dikonfirmasi ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan bahwa Kadishub Kota Denpasar Gede Astika diminta keterangannya.

"Ya benar ada pemanggilan lagi untuk dapat penjelasan dari Kadishub," jelasnya. Dia juga mengatakan ada beberapa staf lagi. Benar ada staf Polresta? "Ahh, endak ngapain manggil dari unsur kepolisian. Ndak ada," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Astika sudah sempat diperiksa di Kejati Bali. Kejati Bali juga sudah memeriksa Kepala Badan Perizinan Rai Soeriawan, Kadispenda Dewa Nyoman Semadi dan Kadis DTRP Kusuma Diputra. Kemudian juga memeriksa Kadis DKP Ketut Wisada dan Kasatpol PP IB Alit Widarana. Ada dugaan ada permainan atau mafia izin reklame atau permainan pajak reklame di Denpasar. Lantaran muncul rumor ada permainan dana pelicin dalam izin reklame. (art/han)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 24



Hibah Rp 1 Miliar, Tak Tahu Cara Mengaspal

BANGLI - Harapan warga tiga desa di wilayah Kintamani. Yakni Desa Gunung Bau, Belanga, dan Binyan, untuk memiliki jalan tembus yang bagus belum bisa terwujud. Pasalnya, pembuatan jalan tembus dengan lebar tujuh meter dan panjang sekitar dua kilometer itu belum selesai karena banyak kendala yang dihadapi.

Pembangunan jalan tembus itu berasal dari dana hibah bupati sebesar Rp 1 miliar. Saat ini

baru tahap pemasangan batu geladak saja. Jalan itu memang sudah bisa dilalui kendaraan tetapi cukup membahayakan karena batu geladak tersebut tajam. Menurut warga beberapa kendaraan yang melintas mengalami pecah ban karena terkena batu yang tajam. "Batu yang tajam bisa menembus ban sehingga pecah," kata Ketut Sayang, salah warga, Selasa (14/3) kemarin.

Sementara Perbekel Desa Gunung Bau I Wayan Armawa,

ketika dikonfirmasi mengatakan awalnya pembangunan jalan dengan dana hibah Rp 1 miliar tahun 2014 itu dikira dikerjakan pemerintah karena sebelumnya melibatkan karya bhakti TNI dan warga sifatnya hanya membantu saja. Namun kenyataannya pengerjaan di swakelola dengan dibantu karya bhakti TNI. Sehingga pihaknya bersama warga kaget. Ditambah lagi karena keterbatasan pengetahuan cara mengaspal jalan. "Kare-

na keterbatasan kemampuan kami dalam membuat jalan aspal maka kualitasnya masih kurang," ujarnya. Selain itu waktu pengerjaannya juga terlambat dan sering terganggu karena sering ada kegiatan adat. Sehingga pengerjaannya jalan tembus itu tidak selesai tepat waktu yakni Desember lalu. Jalan sepanjang sekitar 300 meter tidak dikerjakan dan sisa dana sebesar Rp 200 juta harus dikembalikan ke kas daerah. "Jalan yang belum

sempat dikerjakan itu, kini banyak jebol akibat tergerus air hujan," paparnya.

Untuk kelanjutan pembangunan jalan itu pihaknya masih mengadakan rembuk dengan kepala desa dan panitia untuk mencari sumber dana. Pasalnya, sesuai rapat terakhir ketiga kepala desa sepakat untuk melanjutkan pembangunan namun tidak berani mengajukan proposal ke Pemkab lantaran takut kalau disetujui nanti akan mengundang kecemburuan. (**don/gup**)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 25



Revertmen CI Disebut Tak Berizin

Pejabat Badung Turun,
Dewan Bali Dukung Pemkab

MANGUPURA - Pejabat Badung ramai-ramai melakukan pengecekan ke hotel Cangu Intercontinental (CI) kemarin (14/4). Dipimpin Wabup Made Suidana didampingi empat kepala SKPD, para pejabat ini melihat bakal hotel bintang lima ini. Yang menjadi sorotan dalam pengecekan itu adalah pembangunan revertmen atau tanggul pemecah ombak. Tim dari pemkab menilai tanggul tersebut belum memiliki izin.

"Kalau masalah bangunan hotel tidak ada masalah, karena mereka belum membangun. Yang jadi masalah hanyalah pembangunan revertmen saja. Semestinya harus ada kajian serta memperoleh izin dari Kementerian PU," papar Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Badung Made Sutama. Belum punya izin kok sudah selesai membangun tanggul pemecah ombak? "Kami di BPPT tidak mengurus hal itu," jawabnya singkat.

Sutama menyebut pihaknya sudah menyarankan pihak pengusaha agar mengurus izin revertmen agar sesuai kajian. Sehingga pembangunan bisa kembali dilaksanakan. Sutama juga menyebut jika investor sudah memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UPL) tahun 2012.

Di lain bagian, Kepala DCK Badung Ni Putu Dessy Dharmayanty mengatakan, untuk masalah pembangunan pondasi itu, pihaknya masih menunggu kajian dari Satuan Kerja Pantai Direktorat Sumber Daya Air. "Karena pondasi itu dibangun sebagai revertmen dan pembatas lahan mereka untuk itu perlu kajian," terangnya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Bali IGK Kresna Budi yang juga anggota panitia khusus (pan-sus) Zonasi DPRD Bali mendukung sikap bupati Badung untuk menindak tegas pencaplokan sempadan pantai dalam pembangunan hotel Cangu Intercontinental yang menuai protes keras masyarakat adalah bentuk sikap bupati yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (san/prah/han)

Edisi : Rabu, 15 April 2015

Hal : 24